



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

WASPADA PENINGKATAN KASUS CACAR MONYET (MPOX)

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Status pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia telah berakhir pada 21 Juni 2023 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi muncul ancaman penyakit menular yaitu cacar monyet (Mpx). Mpx disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan atau manusia yang terinfeksi serta melalui benda yang terkontaminasi. Penyakit ini bersifat endemis di wilayah Afrika.

Pada tanggal 20 Agustus 2022, kasus Mpx pertama kali dilaporkan terjadi di Indonesia dan menjadi kasus satu-satunya selama tahun 2022. Sedangkan pada tahun ini, kasus Mpx mengalami kenaikan. Pada konferensi pers tanggal 26 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sejak 13 Oktober 2023, jumlah kasus terkonfirmasi positif Mpx mencapai 14 orang, kontak erat sebanyak 2 orang, dan suspek sebanyak 9 orang. Dari 14 kasus terkonfirmasi positif, terdapat beberapa karakteristik penderita yaitu berjenis kelamin laki-laki; 64% berusia 25-29 tahun; 36% berusia 30-39 tahun; tertular melalui perilaku seks berisiko; 12 orang domisili Jakarta dan 2 orang domisili Tangerang; 12 orang berperilaku seksual sejenis, 1 orang biseksual, dan 1 heteroseksual; 12 orang dengan HIV AIDS (ODHIV); dan 5 orang penderita penyakit sifilis. Berdasarkan karakteristik tersebut, terlihat bahwa keseluruhannya berkaitan dengan risiko seksual.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dari meningkatnya kasus Mpx. *Pertama*, terbatasnya vaksin Mpx. Saat ini, hanya tersedia 1.000 dosis vaksin Mpx. Menurut prediksi Kementerian Kesehatan, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk 3.600 kasus Mpx yang akan terjadi selama satu tahun. Padahal vaksin tersebut dibutuhkan bagi kelompok risiko tinggi seperti kontak erat, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Oleh karenanya, dibutuhkan jumlah vaksin yang lebih besar. ASEAN akan memberikan bantuan sebanyak 2.000 dosis vaksin. Di sisi lain, Pemerintah perlu terus mengupayakan penambahan ketersediaan vaksin Mpx mengingat meningkatnya jumlah kebutuhan. *Kedua*, sulitnya kegiatan surveilans. Mpx berkaitan erat dengan perilaku menyimpang yaitu hubungan seksual sesama jenis. Perilaku tersebut membuat penderita menjadi tertutup sehingga penemuan kasus menjadi lambat dan penularan sulit dihambat. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia menyarankan adanya pendekatan komunitas terkait populasi khusus dengan tujuan untuk mempermudah pelacakan. *Ketiga*, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Proses penyembuhan Mpx membutuhkan waktu dua hingga tiga pekan. Selama proses tersebut, pasien harus diisolasi sehingga dibutuhkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. *Keempat*, kewaspadaan tenaga kesehatan dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi risiko penularan. Kewaspadaan dapat ditingkatkan dengan memperkuat Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti: rajin memakai masker dan mencuci tangan serta lebih bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi dan tidak berganti-ganti pasangan.

Atensi DPR

Kasus Mpox mengalami peningkatan dalam sebulan terakhir, sedangkan ketersediaan vaksin, proses surveilans, sarana dan prasarana serta tingkat kewaspadaan masih sangat terbatas. Oleh karenanya Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengawasi upaya pemerintah dalam mencegah peningkatan kasus Mpox.
2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengadaan vaksin dan perluasan cakupan vaksinasi.
3. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya surveilans supaya kasus dapat lebih cepat ditemukan dan segera dilakukan penanganan.
4. Memastikan adanya upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kasus Mpox.
5. Memastikan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi PHBS dan menjaga kesehatan reproduksi.

Sumber

antaranews.com, 26 Oktober 2023;
cnbcindonesia.com, 20 Agustus 2022;
Kompas, 27 Oktober 2023;
sehatnegeriku.kemkes.go.id, 27 Oktober 2023; dan
who-int.translate.goog, 18 April 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023